



P E N E T A P A N
Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Irwan, Lahir di Biak, 17 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Perumnas Sumberker Blok E/142 Dusun Sumberker Desa Anjrew, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 15 September 2022 di bawah nomor register 82/Pdt.P/2022/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama FITRAH yang lahir di Sape Bima pada tanggal 1 Juli 2004 adalah anak sah dari suami-Istri SIRAJUDIN dan ARFAH;
2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal dengan pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama SIRAJUDIN dan ARFAH saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bima Propinsi Nusatenggara Barat;
4. Bahwa anak yang bernama FITRAH saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI AD;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa guna kepentingan tersebut di butuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat- surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama IRWAN Pekerjaan TNI-AD, tempat/tanggal lahir Bima 17 Mei 1983 Alamat Perumnas Sumberker Blok E/142 Dusun Sumberker Desa Anjrew Kecamatan Samofa Kab. Biak Numfor Propinsi Papua sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama FITRAH yang lahir di Sape Bima pada tanggal 1 Juli 2004 adalah anak sah dari suami-istri SIRAJUDIN sama ARFAH;
Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya dan sudah dirubah/renvoi pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan, NIK: 9104011705830009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5206-LT-14122015 atas nama Fitrah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sape Nomor DN-23/M-SMA/K13/0013309 atas nama Fitrah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106121905160003 atas nama kepala keluarga Irwan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian dari Sirajudin kepada Irwan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Lestara Yanto**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Fitrah dalam mengikuti tes prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi mengenal anak yang bernama Fitrah;
- Bahwa Fitrah merupakan anak saudara Pemohon yang bernama Arfah yang merupakan ibu kandung Fitrah;
- Bahwa Fitrah lahir di Bima pada tanggal 1 Juli 2004;
- Bahwa saksi sudah lulus SMA di Bima;
- Bahwa kedua orang tua Fitrah pada saat ini tinggal di Bima, sedangkan Fitrah tinggal di Biak bersama dengan Pemohon sejak bulan juni tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Fitrah ada di Biak;
- Bahwa Pemohon sudah menganggap Fitrah sebagai anaknya sendiri;
- Bahwa kedua orang tua Fitrah telah memberikan izin kepada Fitrah untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Fitrah sebagai prajurit TNI-AD;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Fitrah sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Fitrah dalam melengkapi persyaratan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rendi Maulana**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Fitrah dalam mengikuti tes prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi mengenal anak yang bernama Fitrah;
- Bahwa Fitrah merupakan anak saudara Pemohon yang bernama Arfah yang merupakan ibu kandung Fitrah;
- Bahwa Fitrah lahir di Bima pada tanggal 1 Juli 2004;
- Bahwa saksi sudah lulus SMA di Bima;
- Bahwa kedua orang tua Fitrah pada saat ini tinggal di Bima, sedangkan Fitrah tinggal di Biak bersama dengan Pemohon sejak bulan juni tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Fitrah ada di Biak;
- Bahwa Pemohon sudah menganggap Fitrah sebagai anaknya sendiri;
- Bahwa kedua orang tua Fitrah telah memberikan izin kepada Fitrah untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Fitrah sebagai prajurit TNI-AD;
- Bahwa orang tua Fitrah sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Fitrah dalam melengkapi persyaratan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali bagi keponakan Pemohon yang bernama Fitrah, lahir di Bima tanggal 1 Juli 2004 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Sirajudin dan ibu Arfah, guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Lestari Yanto dan Saksi Rendi Maulana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya, menantunya serta Fitrah di Perumnas Sumberker Blok E/142 Dusun Sumberker Desa Anjrew Kecamatan Samofa Kab. Biak Numfor Propinsi Papua, (sebagaimana bukti P-1, P-4, P-5 dan keterangan saksi);
2. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Fitrah, lahir di Bima tanggal 1 Juli 2004 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Sirajudin dan ibu Arfah, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD (Sebagaimana bukti P-5 dan keterangan saksi);

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Fitrah telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sape tahun pelajaran 2021/2022 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-3);
4. Bahwa Fitrah adalah anak kandung dari bapak Sirajudin dan ibu Arfah, yang mana saat ini orangtua kandung Fitrah sedang berada di Bima (Sebagaimana bukti P-5 dan keterangan saksi);
5. Bahwa Pemohon adalah saudara dari ibu kandung Fitrah, yang mana Fitrah sudah tinggal dengan Pemohon sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang dan Pemohon sudah menganggap Fitrah seperti anak sendiri (sebagaimana bukti P-4);
6. Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Fitrah dan sudah mendapatkan persetujuan/seizin dari orangtua kandung Fitrah (Sebagaimana bukti P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumnas Sumberker Blok E/142 Dusun Sumberker Desa Anjrew Kecamatan Samofa Kab. Biak Numfor Propinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Keponakan Pemohon yang bernama Fitrah, lahir di Bima tanggal 1 Juli 2004 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Sirajudin dan ibu Arfah, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD (sebagaimana bukti P-2, P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Fitrah, lahir di Bima tanggal 1 Juli 2004, saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun (Sebagaimana bukti P-2);

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut Fitrah, lahir di Bima tanggal 1 Juli 2004 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Sirajudin dan ibu Arfah (Sebagaimana bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari orangtua kandung Fitrah untuk dapat menjadi wali dari Fitrah dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AL (Sebagaimana bukti P-5 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Fitrah telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sape tahun pelajaran 2021/2022 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD (Sebagaimana bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon adalah saudara dari Ibu kandung Fitrah, yang mana Fitrah sudah tinggal dengan Pemohon sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang dan Pemohon sudah menganggap Fitrah seperti anak sendiri (sebagaimana bukti P-4 dan keterangan para saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Fitrah tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Fitrah dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah saudara dari ayah kandung Fitrah yang bernama Sirajudin, yang mana Fitrah sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak juni 2022 hingga sekarang, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b butir (f) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali Fitrah;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Fitrah khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b butir (f) Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Fitrah dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 330, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Irwan**, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tempat/Tanggal lahir di Bima, 17 Mei 1983 yang beralamat di Perumnas Sumberker Blok E/142 Dusun Sumberker Desa Anjrew, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai Wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama **Fitrah**, yang lahir di Sape Bima pada tanggal 1 Juli 2004 adalah anak sah dari suami-istri Sirajudin dan Arfah;

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 95.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PNBik